

Analisis Konsep Dan Struktur Kurikulum Merdeka Dan Merdeka Belajar

Ummi Salamah

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

Email: ummisalamah5951@gmail.com

Yuni Listiyani

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

Email: yunilistiyani2003@gmail.com

Mustafiyanti Mustafiyanti

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

Email: mustafiyanti78@gmail.com

Abstract. *The Indonesian government has launched the concept of "Merdeka Belajar" as an effort to improve the quality of education in Indonesia. This concept aims to provide greater freedom and autonomy to educational units in managing and developing their curriculum according to the needs and potential of students. In this paper, we analyze the concept and structure of Merdeka Belajar curriculum which includes four main components, namely: (1) Merdeka Belajar Policy; (2) Merdeka Belajar Curriculum; (3) Merdeka Belajar Learning; and (4) Merdeka Belajar Assessment. Merdeka Belajar Policy gives greater authority to schools in developing curriculum and learning plans according to local needs. Merdeka Belajar Curriculum focuses on developing core competencies and basic competencies needed by students to face the challenges of the 21st century. Merdeka Belajar Learning encourages teachers to use innovative learning methods, such as project-based learning, problem-based learning, and collaborative learning. Merdeka Belajar assessment emphasizes authentic assessment that measures the ability of students holistically. The application of Merdeka Belajar concept is expected to produce graduates who have competencies that are in line with the needs of industry and society, and are able to think critically, creatively, and innovatively.*

Keywords: *Concept, Structure, Independent Curriculum, Independent Learning*

Abstrak. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan konsep "Merdeka Belajar" sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Konsep ini bertujuan untuk memberikan kebebasan dan otonomi yang lebih besar kepada satuan pendidikan dalam mengelola dan mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Dalam makalah ini, kami menganalisis konsep dan struktur kurikulum Merdeka Belajar yang meliputi empat komponen utama, yaitu: (1) Kebijakan Merdeka Belajar; (2) Kurikulum Merdeka Belajar; (3) Pembelajaran Merdeka Belajar; dan (4) Penilaian Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dalam menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Kurikulum Merdeka Belajar berfokus pada pengembangan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dibutuhkan peserta didik untuk menghadapi tantangan abad 21. Pembelajaran Merdeka Belajar mendorong guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kolaboratif. Penilaian Merdeka Belajar menitikberatkan pada penilaian otentik yang mengukur kemampuan peserta didik secara holistik. Penerapan konsep Merdeka Belajar diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat, serta mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif.

Kata Kunci : Konsep, Struktur, Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, pendidikan harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di

masyarakat. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi kualitas maupun relevansi dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah. Kurikulum yang kaku dan terlalu terpusat pada pemerintah dianggap tidak cukup responsif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Hal ini mengakibatkan lulusan pendidikan di Indonesia seringkali belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan masyarakat.

Pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak awal kemerdekaan. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memperkenalkan konsep "Pendidikan Nasional yang Berbasis Kompetensi" dan "Pendidikan yang Berorientasi pada Kualitas" sebagai dasar pendidikan di Indonesia. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terdapat perubahan paradigma dalam pendidikan yang lebih jauh. Oleh karena itu pemerintah Indonesia telah mengembangkan konsep "Pendidikan Merdeka" dan "Merdeka Belajar". Konsep ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) pada tahun 2019. sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Konsep "merdeka belajar" dan "kurikulum merdeka" telah menjadi topik yang sangat hangat dalam diskusi pendidikan di Indonesia. Kedua konsep ini dianggap sebagai strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar. Konsep "Pendidikan Merdeka" dan "Merdeka Belajar" ini berfokus pada pengembangan kemampuan siswa yang lebih luas dan lebih dalam, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam konteks ini, kurikulum menjadi sangat penting sebagai bagian dari sistem pendidikan yang berorientasi pada kualitas. Kurikulum yang efektif harus dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berbagai aspek, seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja sama.

Dalam penerapannya, Merdeka Belajar juga mendorong guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kolaboratif. Metode-metode ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar, sehingga mereka tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Salah satu elemen penting dalam Merdeka Belajar adalah penilaian. Penilaian dalam Merdeka Belajar menitikberatkan pada penilaian otentik yang mengukur kemampuan peserta didik secara holistik, tidak hanya dari aspek kognitif, tetapi juga

afektif dan psikomotorik. Penilaian otentik dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti portofolio, proyek, presentasi, dan observasi.

Penerapan konsep Merdeka Belajar di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan sekolah dan guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan pembelajaran yang lebih fleksibel dan inovatif. Selain itu, perubahan mindset dari pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik juga membutuhkan waktu dan upaya yang intensif. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti pelatihan guru, penyediaan sumber belajar digital, dan pengembangan sistem penilaian yang lebih komprehensif. Selain itu, keterlibatan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua, masyarakat, dan dunia industri, juga menjadi kunci keberhasilan implementasi Merdeka Belajar.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini berupaya menganalisis konsep dan struktur kurikulum merdeka dan merdeka belajar secara komprehensif. Karena pada dasarnya konsep sendiri merupakan ide sebelum penyelenggaraan atau proses pembelajaran di satuan pendidikan dapat diberlangsungkan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu sekumpulan kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka diantaranya dilakukan dengan cara mencari referensi-referensi dari berbagai sumber informasi seperti buku-buku, dokumen, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Adapun pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat ini. (Sugiyono 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar

Konsep Kurikulum Merdeka

Konsep merupakan ide abstrak yang dengannya kita dapat mengelompokkan obyek-obyek kedalam contoh atau bukan contoh. Konsep-konsep ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan antar konsep materi satu dan yang lainnya adalah bukti bahwa pentingnya pemahaman konsep kurikulum. (Yasmansyah 2022). Selama ini kita mengenal

kurikulum sebagai sebuah alat yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan saja. Namun, jika kita mengkaji lebih jauh lagi kurikulum memiliki sebuah konsep yang sangat kompleks dalam dunia pendidikan. Kurikulum memiliki arti sebagai sesuatu yang hidup dan berlaku dalam jangka waktu tertentu dan perlu perubahan agar sesuai dengan perkembangan zaman.(Hermawan, Juliani, and Widodo 2020)

Kurikulum Merdeka adalah bentuk evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka dirancang untuk menerapkan paradigma baru.(Yunaini et al. 2022) Kurikulum Merdeka dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.(Suryati, Desi , Ummi Salamah 2023)

Konsep Kurikulum Merdeka Belajar juga mencakup pembelajaran sepanjang hayat, yang mengedepankan pengembangan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Peserta didik diarahkan untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan di era digital, seperti literasi digital, pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka Belajar diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan di dunia nyata.(Septiani 2023)

Konsep Merdeka Belajar

Sedangkan Merdeka belajar artinya kebebasan belajar, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar sebebas mungkin untuk belajar dengan tenang, santai, dan bahagia tanpa stres dari tekanan dengan memperhatikan bakat alami mereka, tanpa memaksa peserta didik untuk belajar atau menguasai suatu bidang ilmu di luar hobi dan kemampuannya, sehingga masing-masing memiliki portfolio yang sesuai dengan passion.(Ikhwaniul 2023)

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai merdeka belajar dapat dilihat dalam pemikirannya mengenai pendidikan yang mendorong terhadap perkembangan siswa, yaitu pendidikan mengajarkan untuk mencapai perubahan dan dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Pendidikan juga merupakan sarana untuk meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan potensi yang ada dalam diri karena selama ini pendidikan hanya mengembangkan aspek kecerdasan tanpa diimbangi dengan sikap perilaku yang berkarakter dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Anak didik memiliki dasar jiwa dimana keadaan yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan dari lingkungan. Dapat diilustrasikan anak yang baru saja lahir ke dunia ibarat seperti kertas putih

yang belum dicoret oleh tinta, dari sini dapat dipahami kaum pendidik boleh mengisi kertas putih tersebut menurut kehendaknya.(Ainia 2020)

Merdeka belajar yang menjadi gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai pendidikan yang seharusnya terselenggarakan di Indonesia. Misalnya kata Nadiem, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolok ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai. “Kita sebagai orangtua tentu tidak bisa memaksakan anak kita yang menyukai seni untuk belajar secara mendalam komputer dan sebaliknya,” kata Nadiem. Nadiem mengatakan, anak itu pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu dan keinginan belajar. “Jadi tidak ada anak pemalas atau anak yang tidak bisa,” tegasnya. Implementasi Merdeka Belajar merupakan terobosan Kemendikbud-ristek untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui kebijakan yang menguatkan peran seluruh insan pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui empat upaya perbaikan. Pertama, perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, yakni perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. Keempat, melakukan perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.(Munawar 2022)

Dapat disimpulkan bahwa pengertian konsep Merdeka dan Merdeka Belajar ini menekankan pada pemberian kebebasan dan tanggung jawab kepada peserta didik, serta mendorong partisipasi aktif, kemandirian, dan pengembangan potensi pribadi mereka dalam konteks pendidikan.

Struktur Kurikulum Merdeka Dan Merdeka Belajar

Dalam gambaran penerapan kurikulum merdeka, bentuk struktur kurikulum Merdeka terdiri dari atas kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Dimana, alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam satu tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Secara umum, sebagaimana dikutip laman Kemendikbudristek, tidak ada perubahan pada total jam pelajaran. Kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan melatih peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, alokasi waktu tersendiri sangat dibutuhkan guna memastikan proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dapat berjalan dengan baik. Di sisi lain, untuk muatan lokal satuan pendidikan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik. Satuan pendidikan atau daerah dapat mengelola

kurikulum muatan lokal secara fleksibel. Muatan lokal dapat dilakukan melalui tiga metode yaitu dengan metode mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain, mengintegrasikan muatan lokal ke tema proyek penguatan profil Pancasila, atau mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. (Anggara, Ari 2023)

Struktur kurikulum di Kurikulum Merdeka didasari tiga hal, yaitu: berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Berikut adalah beberapa prinsip pengembangan struktur Kurikulum Merdeka.

a. Struktur Minimum

Struktur kurikulum minimum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, satuan pendidikan bisa mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Satu jam pelajaran di SD adalah 35 menit, di SMP adalah 40 menit, dan di SMA 45 menit.

b. Otonomi

Kurikulum memberi kemerdekaan pada satuan pendidikan dan guru untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual.

c. Sederhana

Perubahan dari kurikulum sebelumnya dibuat seminimal mungkin, namun tetap signifikan. Tujuan, arah perubahan, dan rancangannya dibuat jelas sehingga mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan.

d. Gotong Royong

Pengembangan kurikulum dan perangkat ajar adalah hasil kolaborasi puluhan institusi, di antaranya Kementerian Agama, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya.

e. Struktur Per Jenjang

Pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka diatur berdasarkan jenjang, yaitu PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. (Ristek, 2024)

1. Struktur Kurikulum Merdeka Belajar Fase D (Kelas VII, VIII dan IX)

Struktur Kurikulum SMP/MTs	Struktur kurikulum dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan pembelajaran utama, yaitu: a. Pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler; dan b. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
Jam Pelajaran (JP)	Jam Pelajaran (JP) diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai JP yang ditetapkan.
Pendekatan Pembelajaran	Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi.
Informasi Terkait Mata Pelajaran	a. Mata pelajaran Informatika merupakan mata pelajaran wajib. b. Satuan pendidikan atau murid dapat memilih setidaknya 1 dari 5 mata pelajaran Seni dan Prakarya: Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, atau Prakarya.

Alokasi waktu mata pelajaran SMP/MTs kelas 7–8

Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 40 menit

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu)	Alokasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Pancasila	72 (2)	36	108
Bahasa Indonesia	180 (5)	36	216
Matematika	144 (4)	36	180
Ilmu Pengetahuan Alam	144 (4)	36	180
Ilmu Pengetahuan Sosial	108 (3)	36	144
Bahasa Inggris	108 (3)	36	144
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72 (2)	36	108
Informatika	72 (2)	36	108
Seni dan Prakarya**: 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya (Budidaya, Kerajinan, Rekayasa, atau Pengolahan)	72 (2)	36	108
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2)***	-	72***
Total****:	1044 (29)	360	1.404

Keterangan:

* Diikuti murid sesuai agama masing-masing.

** Satuan pendidikan menyediakan minimum 1 jenis seni atau prakarya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, dan/atau Prakarya). Murid memilih salah satu.

*** Paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun.

**** Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Perhatikan daftar mata pelajaran kelas IX beserta alokasi waktunya berikut ini.

Asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 40 menit

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu)	Alokasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Pancasila	64 (2)	32	96
Bahasa Indonesia	160 (5)	32	192
Matematika	128 (4)	32	160
Ilmu Pengetahuan Alam	128 (4)	32	160
Ilmu Pengetahuan Sosial	96 (3)	32	128
Bahasa Inggris	96 (3)	32	128
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	64 (2)	32	96
Informatika	64 (2)	32	96
Seni dan Prakarya**: 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya (Budidaya, Kerajinan, Rekayasa, atau Pengolahan)	64 (2)	32	96
Muatan Lokal	64 (2)***	-	64***
Total****:	928 (29)	320	1.248

Keterangan:

*Diikuti murid sesuai agama masing-masing.

** Satuan pendidikan menyediakan minimum 1 jenis seni atau prakarya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, dan/atau Prakarya). Murid memilih salah satu.

*** Paling banyak 2 JP per minggu atau 64 JP per tahun.

**** Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

➤ **Penjelasan struktur kurikulum SMP/MTs/ sederajat secara umum**

- Muatan pelajaran kepercayaan untuk penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan YME dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di SMP/MTs/ sederajat menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai kondisi peserta didik.
- Beban belajar bagi penyelenggara pendidikan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SKS.
- Proses mengidentifikasi dan menumbuhkembangkan minat, bakat, dan kemampuan murid dilakukan oleh guru yang dikoordinasikan oleh guru BK. Jika ketersediaan guru BK belum mencukupi, maka koordinasi dilakukan oleh guru lain. (Kemendikbud 2024)

2. Struktur Kurikulum Merdeka Belajar Fase E (Kelas X)

Struktur Kurikulum Merdeka Belajar Fase E (Kelas X) Mata pelajaran IPA, yaitu Fisika, Kimia, dan Biologi, tidak dipisah per mata pelajaran seperti pada kurikulum sebelumnya. Namun, terintegrasi sebagai mata pelajaran IPA. Hal serupa juga berlaku pada mata pelajaran IPS. Dalam hal ini, sekolah diberi kebebasan untuk memilih pendekatan yang tepat dalam mengorganisasikan mata pelajaran tersebut. Pendekatan yang bisa dipilih adalah sebagai berikut.

- Integrasi pembelajaran antara IPA dan IPS.
- Pembelajaran IPA dan IPS dilakukan secara bergantian dalam blok waktu terpisah.
- Pembelajaran IPA dan IPS dilakukan secara paralel dengan pemisahan setiap mata pelajaran. Jika memilih pendekatan ketiga ini, guru harus membuat pembelajaran inkuiri yang mengintegrasikan mata pelajaran IPA dan IPS.

Perhatikan daftar mata pelajaran kelas X beserta alokasi waktunya berikut ini.

Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu)	Alokasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Pancasila	54 (2) **	18	72
Bahasa Indonesia	108 (3)	36	144
Matematika	108 (3)	36	144
Ilmu Pengetahuan Alam: Fisika, Kimia, Biologi	216 (6)	108	324
Ilmu Pengetahuan Sosial: Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi	288 (8)	144	432
Bahasa Inggris	54 (2) **	18	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72 (2)	36	108
Informatika	72 (2)	36	108
Seni dan Prakarya**: 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya (Budidaya, Kerajinan, Rekayasa, atau Pengolahan)	54 (2) **	18	72
Muatan Lokal	72 (2) *****	-	72*****
Total*****:	1.098 (32)	486	1.584

Keterangan:

* Diikuti murid sesuai agama masing-masing.

** Pembelajaran reguler tidak penuh, yaitu 36 minggu, untuk memenuhi alokasi proyek. Alokasi intrakurikuler Pendidikan Pancasila, Bahasa Inggris, serta Seni dan Prakarya hanya 27 minggu.

*** Satuan pendidikan menyediakan minimum 1 jenis seni atau prakarya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, dan/atau Prakarya dan Kewirausahaan). Murid memilih salah satu.

**** Paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun.

***** Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

3. Struktur Kurikulum Merdeka Belajar Fase F (Kelas XI dan Kelas XII)

Struktur Kurikulum Merdeka belajar fase F dibagi menjadi lima kelompok utama mata pelajaran seperti berikut.

- Kelompok Mata Pelajaran Umum, Kelompok mata pelajaran ini wajib diikuti oleh semua peserta didik SMA/MA.
- Kelompok Mata Pelajaran MIPA, Kelompok MIPA terdiri dari Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan Informasi. Setiap sekolah wajib menyediakan minimal tiga mata pelajaran di kelompok ini.
- Kelompok Mata Pelajaran IPS, Kelompok IPS meliputi Ekonomi, Antropologi, Geografi, dan Sosiologi. Sama seperti kelompok MIPA, setiap sekolah wajib menyediakan minimal tiga mata pelajaran di kelompok ini.
- Kelompok Mata Pelajaran Bahasa dan Budaya, Kelompok Bahasa dan Budaya bersifat pilihan. Artinya, sekolah diberi kebebasan untuk membuka kelompok mata pelajaran ini atau tidak, disesuaikan dengan ketersediaan SDM di sekolah.
- Kelompok Vokasi dan Prakarya, Kelompok mata pelajaran ini bersifat opsional atau pilihan. Pengadaannya bergantung pada ketersediaan SDM di sekolah.

Ketentuan yang harus dijalankan oleh sekolah maupun peserta didik adalah sebagai berikut:

- a. Setiap sekolah wajib membuka minimal 3 kelompok mata pelajaran.
- b. Setiap peserta didik wajib memilih minimal dua kelompok mata pelajaran yang disediakan oleh sekolah, sesuai dengan minat dan bakat. Hal ini memungkinkan terjadinya pembelajaran lintas mapel.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan daftar mata pelajaran kelas XI beserta alokasi waktunya berikut ini.

Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit

Mata Pelajaran		Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu)	Alokasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun	Total JP Per Tahun
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum				
1.	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
	Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
	Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
	Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
	Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
2.	Pendidikan Pancasila	54 (2) **	18	72
3.	Bahasa Indonesia	108 (3)	36	144
4.	Matematika	108 (3)	36	144
5.	Bahasa Inggris	54 (2) **	18	72
6.	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72 (2)	36	108
7.	Sejarah	54 (2) **	18	72
8.	Seni dan Budaya***: 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	54 (2) **	18	72
Jumlah JP Mata Pelajaran Umum		576 (18)	216	792

Keterangan:

* Diikuti murid sesuai agama masing-masing.

** Pembelajaran reguler kelas 11 tidak penuh, yaitu 36 minggu, untuk memenuhi alokasi proyek. Alokasi intrakurikuler Pendidikan

Pancasila, Bahasa Inggris, Seni, dan Sejarah hanya 27 minggu.

*** Satuan pendidikan menyediakan minimum 1 jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, dan/atau Seni Tari). Murid memilih 1 (satu) salah satu.

Perhatikan daftar mata pelajaran kelas XII beserta alokasi waktunya berikut ini.

Asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 45 menit.

Mata Pelajaran		Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu)	Alokasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun	Total JP Per Tahun
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum				
1.	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
	Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
	Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
	Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
	Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
2.	Pendidikan Pancasila	48 (2) **	16	64
3.	Bahasa Indonesia	96 (3)	32	128
4.	Matematika	96 (3)	32	128
5.	Bahasa Inggris	48 (2) **	16	64
6.	Seni dan Budaya***: 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	48 (2) **	16	64
7.	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	64 (2)	32	96
8.	Sejarah	48 (2) **	16	64
Jumlah JP Mata Pelajaran Umum		512 (18)	192	704

Keterangan:

* Diikuti murid sesuai agama masing-masing.

** Pembelajaran reguler kelas 12 tidak penuh, yaitu 32 minggu, untuk memenuhi alokasi projek. Alokasi intrakurikuler Pendidikan Pancasila, Bahasa Inggris, Seni, dan Sejarah hanya 24 minggu.

*** Satuan pendidikan menyediakan minimum 1 jenis seni dan budaya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, dan/atau Seni Tari). Murid memilih 1 salah satu.(Octasari 2023)

➤ **Penjelasan struktur kurikulum SMA/MA/ sederajat secara umum**

- a. Satuan pendidikan wajib membuka kelompok mata pelajaran umum serta sekurang-kurangnya 7 mata pelajaran pilihan.
- b. Setiap murid wajib mengikuti:
 - i. seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum;
 - ii. memilih 4–5 mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik kelas 10.
- c. Murid diperbolehkan mengganti mata pelajaran pilihan pada kelas 11 semester 2 berdasarkan penilaian ulang satuan pendidikan terhadap minat, bakat, dan kemampuan peserta didik.
- d. Muatan pelajaran kepercayaan untuk penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan YME dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- e. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di SMA/MA/ sederajat menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai kondisi peserta didik.
- f. Beban belajar bagi penyelenggara pendidikan dengan SKS dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SKS.
- g. Proses mengidentifikasi dan menumbuhkembangkan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dilakukan oleh guru yang dikoordinasikan oleh guru BK. Jika ketersediaan guru BK belum mencukupi, maka koordinasi dilakukan oleh guru lain.(Ristek 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis konsep dan struktur kurikulum Merdeka Belajar yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin penting:

1. Konsep Kurikulum Merdeka Belajar mengedepankan otonomi dan fleksibilitas lebih besar bagi satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan lokal.
2. Struktur kurikulum dalam Merdeka Belajar diorganisasi ke dalam 4 komponen utama, yaitu: kebijakan, kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Secara khusus, kurikulum menitikberatkan pada pengembangan kompetensi inti dan dasar relevan dengan abad 21.
3. Metode pembelajaran yang digalakkan antara lain pembelajaran berbasis proyek, masalah, dan kolaboratif untuk meningkatkan keaktifan siswa. Penilaian menitikberatkan pada penilaian otentik yang menguji kemampuan siswa secara menyeluruh.
4. Implementasi Merdeka Belajar di sekolah membutuhkan perubahan mindset dan kemampuan serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Namun diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri dan mampu berpikir kritis serta inovatif.

Demikian kesimpulan mengenai konsep dan struktur kurikulum Merdeka Belajar berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pembahasan dan implementasi Merdeka Belajar ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainia, D. K. (2020). Merdeka belajar dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara dan relevansinya bagi pengembangan pendidikan karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 99.
- Anggara, A., et al. (2023). Penerapan kurikulum merdeka belajar pada satuan pendidikan jenjang SMP. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 1899–1890.
- Hermawan, Y. C., Juliani, W. I., & Widodo, H. (2020). Konsep kurikulum dan kurikulum pendidikan Islam. *Jurnal Mudarrisuna*, 10(1), 29.
- Ikhwanul, M. (2023). Konsep dan implementasi kurikulum merdeka belajar pada lembaga pendidikan Islam: Studi kasus di madrasah se-Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 5(1), 50.
- Kemendikbud, Ristek. (2024). Struktur kurikulum SMP / MTs. Retrieved from <https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/id/articles/14179832698137-Struktur-Kurikulum-Merdeka-dalam-Setiap-Fase-2:1-4>.

- Munawar. (2022). Merdeka belajar. *Jurnal Ilmiah Pedagogy*, 21(1), 138.
- Octasari, A. (2023). Analisis struktur kurikulum K13 dan struktur kurikulum merdeka fase E untuk kelas X dan fase F untuk kelas XII. *Jurnal Literasi dan Pembelajaran Indonesia*, 3(1), 24–32.
- Ristek, Kemendikbud. (2024). Struktur kurikulum SMA / MA. Retrieved from <https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/id/articles/14179832698137-Struktur-Kurikulum-Merdeka-dalam-Setiap-Fase>: 9.
- Septiani, P. (2023). Implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar dan efektivitas peran guru. *Conference of Elementary Studies*, 1(1), 588.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryati, D., Salamah, U., & Mustafiyanti. (2023). Efektivitas penggunaan kurikulum merdeka belajar sebagai pengganti kurikulum 2013 dalam dunia pendidikan. *Concept: Jurnal of Humanities and Education*, 2(4), 146.
- Yasmansyah, Z. S. (2022). Konsep merdeka belajar kurikulum merdeka. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia (JPION)*, 1(1), 29.
- Yunaini, N., Prabowo, M., Hassan, N., & Kichi, A. (2022). The concept of the independent learning curriculum (Merdeka Belajar) in elementary schools in view of progressivism educational philosophy. *Jurnal Ilmiah PGMI*, 8(2), 99.